



Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 Agenda Pembangunan Bidang Hukum dan SPI dalam RPJMN 2020-2024

**Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Kementerian PPN/Bappenas**

Jakarta, 04 April 2021



Isu Strategis Bidang Hukum dalam RPJMN 2020—2024

Isu Strategis Pemantapan Sistem Hukum Nasional di dalam Narasi RPJMN 2020-2024

Regulasi yang Disharmoni Inkonsisten Tumpang Tindih Multitafsir



Lemahnya Penegakan Kontrak: **Peringkat 146 dari 190 Negara**
Sumber: World Bank 2019



Melampaui Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (*Overcrowding*) Mencapai **103%**
Sumber: Kementerian Hukum dan HAM, 2019



Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Jabatan Tahun 2019
Anggota DPR dan DPRD: **10 orang**
Pejabat Eselon I/II/III: **28 orang**
Swasta: **49 orang**
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019



Demokrasi Prosedural



Kualitas Reformasi Birokrasi Tidak Merata



Potensi Ancaman terhadap Kedaulatan Negara dan Kejahatan Transnasional

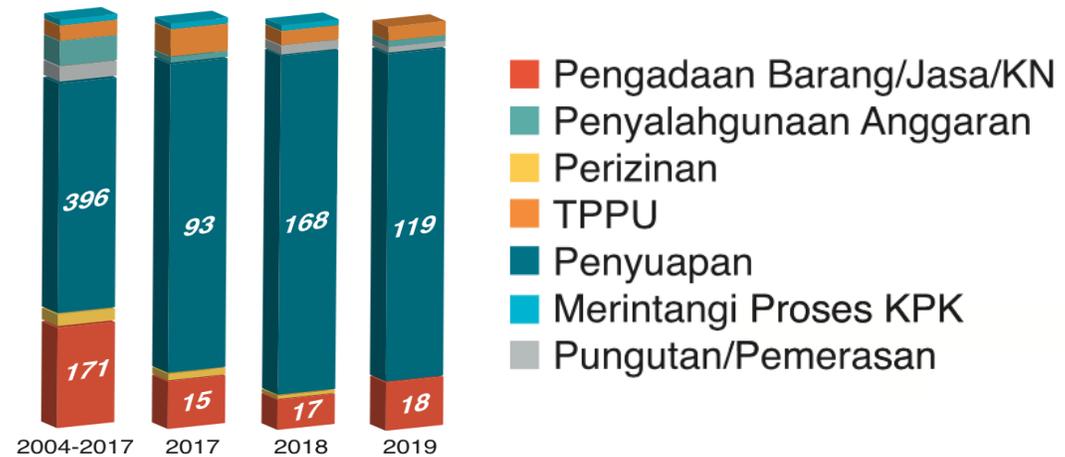


1) Masih Adanya Perilaku Koruptif
2) Penegakan Hukum yang Belum Optimal



Sumber: Diolah Bappenas, 2019

Statistik Penanganan Perkara Oleh KPK Berdasarkan Jenis Perkara

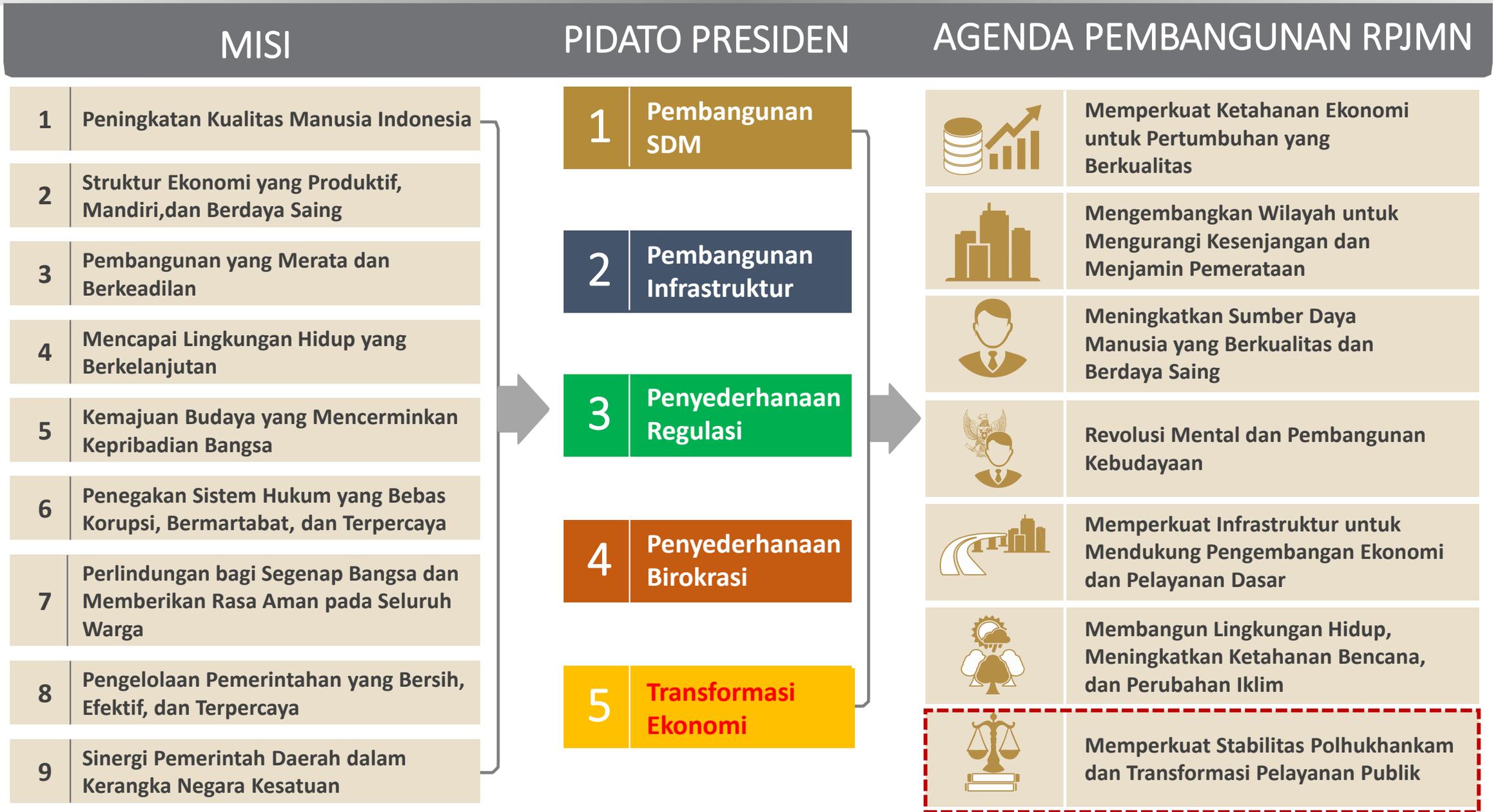


Fokus Isu Pencegahan Korupsi berdasarkan Perpres 54/2018:

- Korupsi di **sektor perizinan** menghambat berusaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja.
- Korupsi pada **sektor keuangan negara** belanja terutama proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan nasional.
- Korupsi terkait **penegakan hukum dan birokrasi** sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara dan kualitas pelayanan publik.



VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG





PP 1 Konsolidasi Demokrasi

PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

PP 4 Reformasi Kelembagaan Birokrasi

PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

PP 3 Penegakan Hukum Nasional



Penataan Regulasi

1. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi
2. Pembaruan Substansi Hukum



Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

1. Penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha
2. Penerapan Keadilan Restoratif
3. Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan
4. Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim



Penguatan Sistem Anti Korupsi

1. Penguatan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
2. Optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset



Penguatan Akses terhadap Keadilan

1. Penguatan layanan keadilan
2. Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat



RPJMN 2020-2024 : Indikator Pembangunan Bidang Hukum



Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
3 Penegakan Hukum Nasional	Indeks Pembangunan Hukum	0.65	0.73
3.1 Penataan Regulasi	Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MK	12,15%	8,15%
	Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MA	11,05%	7,05%
3.2 Perbaiki Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak	120	70
	Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penyelesaian kepailitan	30	20
	Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek mendapatkan kredit	30	20
	Persentase Pelaku Residivis	8,56	6,56%
3.3 Penguatan Sistem Anti Korupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,00	4,14
3.4 Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Indeks Akses terhadap Keadilan	65-70%	71-80%



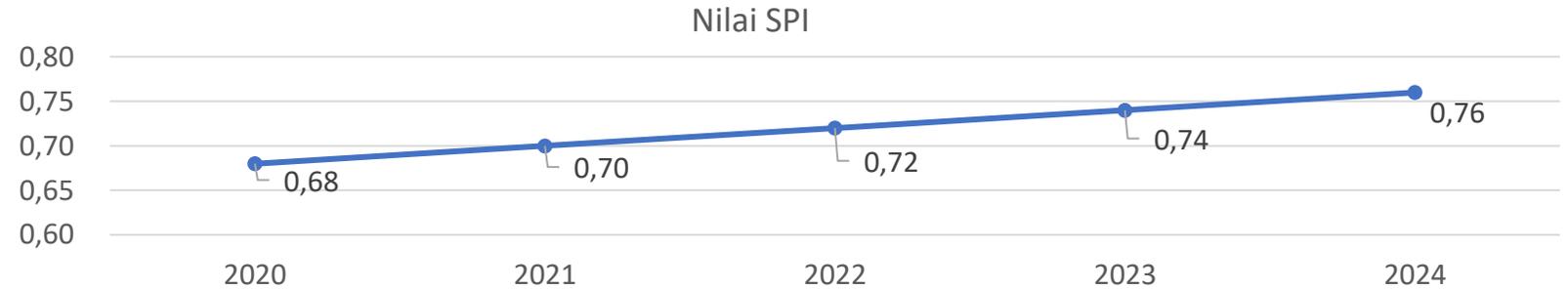
SPI di dalam RPJMN 2020-2024

Penguatan Sistem Anti Korupsi

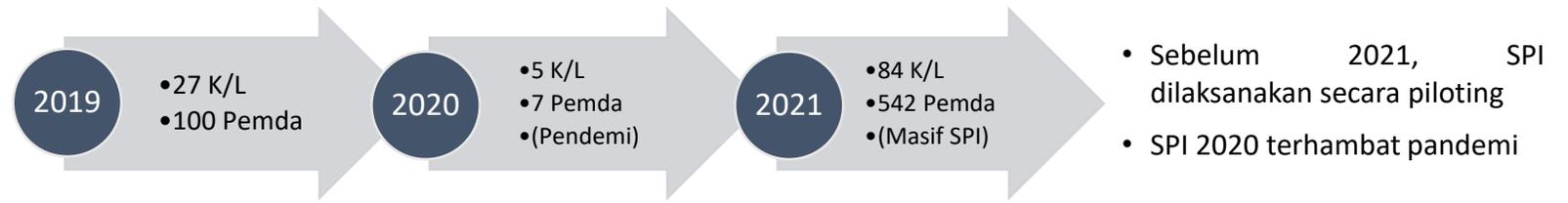
1. Penguatan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
2. Optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset

1. Indikator Salah Satu ProP RPJMN 2020-2024

SPI merupakan Indikator **ProP Penguatan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi** dalam RPJMN 2020-2024



2. Proyek/Output Prioritas Nasional KPK



3. SPI sebagai Indikator dalam Indeks Pembangunan Hukum (IPH)

- Pilar 1: Budaya Hukum
- Pilar 2: Materi Hukum
- Pilar 3: Kelembagaan / Struktur Hukum
- Pilar 4: Penegakan Hukum
- Pilar 5: Informasi dan Komunikasi Hukum

SPI akan menjadi salah satu **indikator** dalam **Indeks Pembangunan Hukum (IPH)**.



Pengukuran Anti Korupsi

Corruption Perception Index (CPI)



- Bersumber pada **13 survei global** dan **penilaian ahli** serta para **pelaku usaha** terkemuka untuk mengukur korupsi di sektor publik.
- Memiliki rentan 0-100 dan dilakukan skoring—*ranking* di **180 negara**.

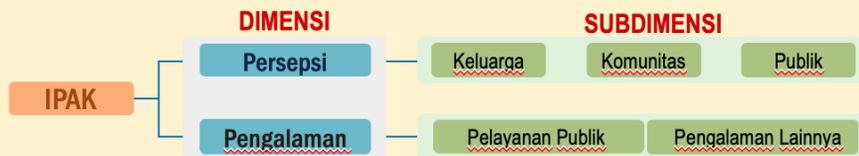
Survey Penilaian Integritas (SPI)

- Menggambarkan kondisi integritas pada **lokus survei (K/L/PD)**.
- Ruang lingkup:
 - Internal** (perspektif pegawai/ASN)
 - Eksternal** (perspektif pengguna layanan)
 - Eksper**



Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

- Mengukur persepsi dan pengalman masyarakat melalui **survey langsung**.
- Perilaku masyarakat yang termasuk **petty corruption**.



Sustainable Development Goals

- **Target 16.5***
Secara substansial mengurangi **korupsi dan penyuapan** dalam segala bentuknya.
- **Target 16.6***
Mengembangkan lembaga yang **efektif, akuntabel, dan transparan** di semua tingkat.



*Menggunakan Indikator Global dan indeks/pengukuran eksisting seperti IPAK, opini BPK, SAKIP, indeks RB, dsb.

SPI dapat menjadi pelengkap pengukuran anti korupsi dan alat **pemetaan potensi korupsi yang spesifik** pada **K/L/PD** dan **3 perspektif berbeda**.



Kesimpulan

- 1** SPI memiliki peran penting bagi agenda pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2020-2024.
- 2** K/L/D diharapkan berpartisipasi dalam pengukuran SPI 2021 yang masif sehingga dapat dilakukan pemetaan risiko korupsi sebagai upaya perumusan kebijakan.
- 3** KPK perlu mempersiapkan kegiatan konsultatif bagi K/L/D untuk menindaklanjuti temuan dan hasil pengukuran SPI.



Kementerian PPN/
Bappenas

TERIMA KASIH

